

Perjuangan Politik Indonesia 1930-1941



Periode 1930-1941 merupakan masa penting dalam perjuangan politik Indonesia menuju kemerdekaan. Berbagai organisasi dan gerakan politik muncul untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Tiga gerakan utama yang akan dibahas adalah Fraksi Nasional, Petisi Sutarjo, dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Masing-masing memiliki pendekatan dan strategi berbeda dalam menghadapi pemerintah kolonial, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam pemerintahan.

Pembentukan Fraksi Nasional



1

Latar Belakang

Ide pembentukan Fraksi Nasional berasal dari Moh. Husni Thamrin, anggota Volksraad dan ketua Perkumpulan Kaum Betawi. Faktor pendorongnya adalah sikap pemerintah terhadap gerakan politik di luar Volksraad, terutama PNI.

2

Pendirian

Fraksi Nasional didirikan pada 27 Januari 1930 di Jakarta, beranggotakan 10 orang anggota Volksraad dari berbagai daerah di Indonesia.

3

Tujuan

Menjamin kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui perubahan ketatanegaraan dan penghapusan perbedaan kolonial.

Kegiatan Fraksi Nasional



1

Pembelaan PNI

Kegiatan pertama Fraksi Nasional adalah membela pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap dalam sidang-sidang Volksraad.

2

Kritik Terhadap Pemerintah

Fraksi Nasional mengkritik pemerintah atas penggeledahan dan penangkapan yang dianggap tidak adil terhadap pergerakan rakyat Indonesia.

3

Usulan Perubahan Hukum

Thamrin mengajukan mosi untuk meninjau kembali artikel-artikel hukum yang merugikan kaum pergerakan.

4

Penolakan Anggaran Pertahanan

Fraksi Nasional menentang rencana peningkatan anggaran pertahanan, menganggap lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Tantangan dan Perkembangan Fraksi Nasional

Masa De Jonge

Diangkatnya De Jonge sebagai gubernur jenderal pada 1931 membawa dampak buruk bagi kondisi sosial dan politik Indonesia. Pemerintahannya yang kaku dan keras dianggap sebagai periode terburuk.

Fokus Ekonomi dan Pendidikan

Fraksi Nasional lebih banyak menyoroti masalah ekonomi masyarakat dan pendidikan, terutama setelah lahirnya peraturan tentang sekolah liar (wilde schoolen ordonantie).

Perlawanan Terhadap Kebijakan

Fraksi Nasional, bersama tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, menentang keras peraturan sekolah liar. Ancaman keluar dari Volksraad oleh M.H. Thamrin akhirnya membuat pemerintah mencabut peraturan tersebut.

Munculnya Petisi Sutarjo

1

Pencetus Ide

Gagasan petisi dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tahun 1936, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamongpraja Bumi Putra (PPBB).

2

Landasan Hukum

Petisi ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda yang menyatakan kesetaraan wilayah Hindia Belanda dengan wilayah Belanda lainnya.

3

Pengajuan Petisi

Petisi diajukan kepada pemerintah Ratu serta Staten Generaal (Parlemen) pada tanggal 15 Juli 1936, meminta diadakannya musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda.



Isi dan Tujuan Petisi Sutarjo

Musyawah Setara

Petisi meminta diselenggarakannya musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda dengan hak yang sama.

Pemerintahan Mandiri

Tujuannya adalah menyusun rencana pemberian pemerintahan yang berdiri sendiri kepada Indonesia dalam batas-batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda.

Implementasi Bertahap

Pelaksanaan rencana akan dilakukan secara berangsur-angsur dalam waktu 10 tahun atau sesuai kesepakatan musyawarah.

Perubahan Ketatanegaraan

Petisi juga mengusulkan berbagai perubahan dalam susunan pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pembentukan provinsi dan dewan kerajaan.

OESOEL PETISI SOETARDJO C. S.

Dengan tarich 15 Juli 1936 telah disorongkan kepada Volksraad oesoel seperti berikoet, (salinan) : —

Kami jang bertanda tangan dibawah ini dengan hormat menjorongkan oesoel, soepaja Volksraad, dengan menggoenakan hak, jang diberikan kepada Madjelis itoe dalam fasal 68 daripada oendang-oendang Indische Staatsrege-ling, mengandjoerkan permohonan kepada Pemerintahan Tinggi dan Staten-Generaal, soepaja soekalah menolong daja-oepaja akan soepaja diadakan sa-toe sidang permoesjawaratan daripada wakil-wakil daripada Nederland dan daripada Hindia-Nederland, jang sidang permoesjawaratan itoe dengan me-makai atoeran hak bersamaan antara anggota-anggotanja, akan mengatoer satoe rentjana, bagi memberikan kepada Hindia-Nederland dengan djalan berangsoer-angsoer, didalam tempo sepoeloeh tahoen, atapoen didalam tem-po jang oleh sidang permoesjawaratan itoe akan dianggap dapat melakoe-kannja, kedoedoekan berdiri-sendiri didalam batas-batas fasal 1 daripada Grondwet.

dan dominion

*round table
conference*



SOETARDJO,
RATU LANGI,
KASIMO,
DATOE TOEMENGGOENG,
KO KWAT TIONG,
ALATAS.

Reaksi Terhadap Petisi Sutarjo

Pers Belanda

Sebagian besar pers Belanda menolak petisi, menganggapnya sebagai "permainan berbahaya" dan belum waktunya. Namun, ada juga orang Belanda yang mendukung.

Pihak Indonesia

Reaksi dari pihak Indonesia beragam. Beberapa anggota Volksraad menganggap petisi kurang jelas, sementara pers Indonesia seperti Pemandangan dan Tjahaja Timoer mendukung.

Volksraad

Petisi diterima untuk dibicarakan dalam sidang khusus Volksraad yang dimulai tanggal 17 September 1936, menunjukkan adanya perhatian serius terhadap usulan ini.



Perdebatan di Volksraad

1

Kelompok van Helsdingen-Notosoeroto

Menolak petisi dengan alasan rakyat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri.
Mengusulkan pembentukan komisi untuk mengontrol tindakan Menteri Jajahan.

2

Kelompok Sokarjo Wirjopranoto

Tegas menolak petisi karena dianggap melemahkan cita-cita Indonesia merdeka. Menuduh Sutarjo menjalankan politik "opportunistische politiek".

3

Kelompok Suroso

Mendukung petisi, berpendapat Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnya diberi lebih banyak hak. Mengusulkan pembentukan Dewan Kerajaan (Rijksraad).



Hasil Pemungutan Suara dan Pengiriman Petisi

Tanggal Pemungutan Suara 29 September 1936

Hasil Suara 26 setuju, 20 menolak

Tanggal Pengiriman 1 Oktober 1936

Penerima Petisi Ratu, Staten Generaal,
Menteri Jajahan

Reaksi Lanjutan dan Pembentukan Komite

1 Pendapat Ahli

Beberapa ahli seperti J.M. Somer dan J.W. Mayer Ranneft memberikan pendapat mereka tentang petisi dan kemungkinan perubahan di Indonesia.

2 Pembentukan Komite

Mei 1937, dibentuk Komite Petisi Sutarjo di Jakarta untuk memperjuangkan petisi tersebut.

3 Usulan Lanjutan

Juli 1937, Sutarjo kembali mengusulkan rencana dua tahap menuju Indonesia berdiri sendiri dalam sidang Volksraad.

4 Dukungan PI

Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda mendukung petisi dengan menerbitkan brosur-brosur.



Pembentukan CCPS dan Reaksi Partai Politik

Central Comite Petisi Sutarjo Sutarjo (CCPS)

Dibentuk pada 4 Oktober 1937 di Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap petisi. Cabang-cabang komite juga dibentuk di daerah-daerah.

Reaksi Partai Politik

Gerindo hanya menyetujui konferensi antara wakil Indonesia dan Belanda, tapi tidak setuju dengan isi petisi. PSII menolak keras dan melarang anggotanya terlibat. Parindra mendukung konferensi tapi menganggap petisi menyimpang dari tujuan utama.

Dukungan Organisasi Lain

Meski ditolak beberapa partai besar, petisi mendapat dukungan dari berbagai organisasi seperti PBBB, Chung Hun Hui, Groep IEV, PEB, dan tokoh-tokoh nasionalis seperti H. Agus Salim dan Mr. Sartono.

Penolakan Petisi dan Pembubaran CCPS

CCPS



1

Laporan Gubernur Jendral

Gubernur Jendral Tjarda menyarankan penolakan petisi kepada menteri jajahan dengan alasan kurang jelas dan tidak ada kepastian.

2

Keputusan Kerajaan Belanda

Dengan SK No. 40 tanggal 16 November 1938, Ratu Belanda menolak petisi dengan alasan bangsa Indonesia belum matang untuk memerintah diri sendiri.

3

Reaksi Kekecewaan

Penolakan ini sangat mengecewakan pemimpin pergerakan. Sutarjo menganggapnya sebagai sikap sombong dan ceroboh pemerintah Belanda.

4

Pembubaran CCPS

Pada rapat CCPS tanggal 11 Mei 1939 di Jakarta, diputuskan untuk membubarkan CCPS karena tugas memperjuangkan petisi dianggap sudah selesai.

Latar Belakang Pembentukan GAPI



Inisiatif Parindra

Parindra mengambil inisiatif untuk membentuk Konsentrasi Nasional sebagai wadah persatuan partai-partai politik.

Kegagalan Petisi Sutarjo

Kegagalan Petisi Sutarjo menjadi salah satu alasan perlunya pembentukan organisasi baru.

Kondisi Internasional

Kegentingan internasional akibat tumbuhnya fasisme menjadi faktor pendorong perlunya persatuan.

Sikap Pemerintah

Sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia mendorong perlunya wadah perjuangan bersama.

Pembentukan dan Tujuan GAPI



1

Pendirian GAPI

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada 31 Mei 1939 di Jakarta sebagai hasil kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi.

2

Struktur Organisasi

Pimpinan pertama GAPI dipegang oleh M. Husni Thamrin, Mr. Amir Sjarifuddin, dan Abikoesno Tjokrosuyoso.

3

Tujuan Utama

GAPI menetapkan tujuan utama yaitu hak menentukan nasib sendiri, persatuan nasional, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

4

Semboyan

Pada konferensi pertama 4 Juli 1939, GAPI mencanangkan semboyan "Indonesia Berparlemen" sebagai fokus perjuangan.

Aksi dan Perjuangan GAPI



1

Manifes GAPI

Mengeluarkan pernyataan mengajak kerjasama antara rakyat Indonesia dan pemerintah Belanda menghadapi fasisme, dengan syarat pemberian hak-hak baru dalam pemerintahan.

2

Kampanye Masif

Mengadakan rapat umum di 1000 tempat di Indonesia pada 12 Desember 1939 untuk mempropagandakan tujuan GAPI.

3

Kongres Rakyat Indonesia

Membentuk Kongres Rakyat Indonesia yang diresmikan pada 25 Desember 1939 di Jakarta, menetapkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai simbol persatuan.

4

Komite Parlemen Indonesia

Membentuk badan-badan Komite Parlemen Indonesia di seluruh Indonesia untuk meningkatkan aksi-aksi GAPI.

Reaksi Terhadap Tuntutan GAPI

Tweede Kamer

Tuntutan GAPI dibicarakan dalam Tweede Kamer saat membahas anggaran belanja Hindia Belanda. Hanya SDAP yang mendukung, sementara partai lain menolak.

Pers Belanda

Secara umum pers Belanda menolak tuntutan GAPI dengan alasan belum waktunya, namun mengakui perlunya perubahan mengingat situasi internasional yang gawat.

Sikap GAPI

GAPI tetap bersikeras akan meneruskan tuntutan Indonesia berparlemen sampai berhasil, meskipun menghadapi penolakan dari berbagai pihak.

Resolusi GAPI dan Pembentukan Komisi Komisi Visman

1

Resolusi Agustus 1940

GAPI mengeluarkan resolusi menuntut perubahan dalam pemerintahan, termasuk penggantian Volksraad dengan parlemen sejati.

2

Pembentukan Komisi Visman

Atas usul anggota Indonesia di Volksraad, pemerintah membentuk Komisi Visman pada 14 September 1940 untuk menyelidiki keinginan perubahan ketatanegaraan.

3

Reaksi GAPI

Awalnya GAPI tidak menyetujui pembentukan komisi ini, namun kemudian melunak dan bersedia bertemu dengan Komisi Visman.

4

Pertemuan dengan Komisi Visman

GAPI menyampaikan usulan bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia yang diinginkan kepada Komisi Visman pada 14 Februari 1941.



Akhir Perjuangan GAPI

Kunjungan Menteri Jajahan

Kunjungan Menteri Jajahan Welter dan van Kleffens April 1941 tidak membawa perubahan berarti, menambah kekecewaan kaum pergerakan.

Pidato Ratu Wilhelmina

Pidato Ratu Wilhelmina di London dan pidato Gubernur Jendral di Volksraad mengenai masa depan Indonesia tidak memenuhi harapan GAPI.

Kondisi Menjelang Perang

Menjelang Perang Dunia II, pemerintah kolonial memperketat izin rapat dan mengeluarkan peraturan wajib bela negara, mempersulit gerakan GAPI.

Invasi Jepang

Perjuangan GAPI terhenti dengan invasi Jepang ke Indonesia pada awal 1942, mengakhiri era pemerintahan kolonial Belanda.

